

Kabinet kerja yang baru dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 lalu mengisyaratkan bahwa anggota kabinet yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. *Merit system* yang tidak sekadar pertimbangan pembayaran hutang politik terlihat dalam pemilihan para pejabat yang duduk di kabinet. Pada level pusat, sistem ini telah dimulai. Meski demikian, kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja ini mengemban pekerjaan rumah birokrasi yang tidak sedikit. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi di atas 40 persen. Proporsi belanja pegawai pada keseluruhan provinsi di Indonesia berada di kisaran 25 persen, sedangkan kabupaten dan kota pada kisaran 51 persen. Meski belanja pegawai cukup tinggi, hal tersebut tidak membawa angin segar pada perbaikan kinerja birokrasi di Indonesia. Peringkat *Ease of Doing Business* (Kemudahan berbisnis) Indonesia masih jauh dibawah lima negara ASEAN lainnya yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Thailand. Penyuaapan dan birokrasi berbelit menjadi dua titik hitam yang menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang memburuk dari tahun 2011 ke 2012 juga merupakan tantangan birokrasi bagi kabinet baru. IPK salah satunya diukur dari gratifikasi dalam birokrasi. Maka, perbaikan dan perombakan birokrasi baik di pusat dan daerah menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Kabinet Kerja. Pekerjaan rumah yang tidak sedikit dalam birokrasi tersebut dan dilantiknya kabinet baru merupakan desakan bagi aparatur di seluruh Indonesia untuk segera meningkatkan kinerjanya.

Tantangan-tantangan diatas harus segera ditangani lantaran pada debat capres dan cawapres lalu, Joko Widodo yang saat ini menjadi presiden terpilih menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Target pertumbuhan tersebut tentu tidak akan lekas tercapai tanpa perombakan birokrasi ke arah yang lebih baik dan berkinerja lebih efektif. Reformasi birokrasi menjadi program nyata pertama dari sembilan program yang dikampanyekan. Reformasi birokrasi akan diprioritaskan dengan sejumlah sub-program antara lain lelang jabatan, pembukaan transparansi sektor publik, restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur, pemberantasan korupsi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik.

Program-program tersebut hendaklah segera didukung oleh seluruh aparatur dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Reformasi birokrasi menuntut lebih dari penyesuaian lingkungan birokrasi dengan kepemimpinan baru namun juga akselerasi kinerja yang diwujudkan secara nyata oleh seluruh birokrat baik di level pusat maupun daerah. Mari bekerja bersama! -Pratiwi